

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi**

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agency*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Pemilik perusahaan, dalam teori keagenan (*agency theory*), diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka dalam perusahaan, sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Perbedaan kepentingan masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan pribadi. Prinsipal menginginkan *return* yang besar dan cepat atas investasi mereka dan menilai prestasi manajer berdasarkan kemampuannya untuk memperbesar laba yang akan dialokasikan pada pembagian dividen. Untuk memenuhi tuntutan prinsipal dan mendapat insentif yang tinggi, manajer akan memainkan beberapa kondisi perusahaan sedemikian rupa seolah-olah target tercapai bila tidak ada pengawasan yang memadai dalam kinerja manajer.

##### **2. Mekanisme *corporate governance***

Tujuan dari mekanisme *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Mekanisme *corporate governance* digunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham. *Corporate*

*governance* memiliki tiga komite yaitu komite audit, komite nominasi dan remunerasi. Definisi *corporate governance* didalam *Forum Corporate Governance* Indonesia (2006) adalah: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholders*. Pelaksanaan tata kelola perusahaan diperlukan untuk memenuhi kepercayaan bagi masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak industri untuk berkembang dengan baik yang bertujuan mewujudkan *stakeholders value* (Restuningdiah, 2010).

Asas *corporate governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha dengan memperhatikan *stakeholders* yaitu (KNKG, 2006):

a. Transparansi

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus bertanggung jawab atas kinerjanya, sehingga perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan

*stakeholders*. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Bertanggung jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan yang memadai.

d. Independen

Dalam melaksanakan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola dengan independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat lima partisipan struktur *corporate governance* yaitu dewan direksi, *Chief Executive Officer (CEO)*, dewan komisaris, *auditor*, dan *stakeholders*. Dewan direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan mencapai tujuan perusahaan. Tugas utama *CEO* adalah menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Lins dan Warnock (2004) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk

mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

### **3. *International Financial Reporting Standart (IFRS)***

*IFRS* merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standart Board (IASB)*. Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu *IASB*, *European Commission (EC)*, *International Organization of Securities Commissions (IOSOC)*, dan *International Federation of Accountant (IFAC)*.

*IASB* yang dahulu bernama *International Accounting Standar Committee (IASC)*, merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. *Pertama*, berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. *Kedua*, pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat

penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). *Ketiga*, tentang pengakuan. Kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. *Keempat*, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

#### **4. Pengungkapan informasi keuangan (*disclosure*)**

Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk berlangsungnya pasar modal yang efisien secara optimum. Banyaknya informasi yang diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca tetapi juga standar yang dianggap cukup. Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam *agency theory*.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

##### **1. Pengungkapan wajib**

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan memperoleh manfaat dari menyembunyikan, sementara yang lain dengan mengungkapkan informasi. Jika perusahaan tidak bersedia mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkan.

## 2. Pengungkapan sukarela

Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu *investor* dalam memahami strategi bisnis manajemen. Ada tiga konsep pengungkapan yang umum :

### a. *Adequate disclosure*

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh *investor*.

### b. *Fair disclosure*

Pengungkapan wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

### c. *Full disclosure*

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang digunakan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik.

Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan *IFRS* untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012. Indonesia melakukan konvergensi *IFRS* secara bertahap sejak 2008 hingga 2011

dimana tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, tahap persiapan akhir yang dilaksanakan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis *IFRS* serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Prawinandi et al., 2012).

*PwC (Pricewaterhouse)* mengeluarkan *checklist* yang bisa dijadikan pedoman dalam pengukuran tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Item-item yang dipilih dari *checklist* ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di setiap negara yang wajib diterapkan pada periode tahun yang diteliti.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Supriyono *et al.* (2014) meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Hasil dari penelitian adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* untuk industri perbankan di Indonesia memiliki rerata 75,92%, angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan ketentuan pengungkapan 100,00%. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* secara umum mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* yaitu, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit.

Prawinandi *et al.* (2012) meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010. Hasil penelitian

menunjukkan rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* adalah 69,900%. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan jasa di Indonesia dalam mengungkapkan informasi yang wajib diungkapkan sesuai dengan ketentuan *IFRS* masih rendah. Struktur *corporate governance* yang berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* adalah proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit.

Utami *et al.* (2012) meneliti mengenai Investigasi dalam Konvergensi *IFRS* di Indonesia: tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan kaitannya dengan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengungkapan wajib *IFRS* sebesar 72,203%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib *IFRS* di Indonesia masih kurang mengingat perusahaan harus mengungkapkan 100,000% untuk pengungkapan wajib. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib *IFRS*. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib *IFRS* yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, sedangkan jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, leverage, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib *IFRS*.

Pitasari dan Septiani (2014) meneliti mengenai analisis pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi *IFRS* pada laporan laba rugi komprehensif pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi *IFRS* pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota

komite audit dan jumlah rapat komite audit. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki komite audit dan telah memenuhi syarat minimal jumlah rapat komite audit akan cenderung mengungkapkan item wajib konvergensi *IFRS* pada laporan laba rugi komprehensif secara luas. Sedangkan jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris belum mampu untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi *IFRS* pada laporan laba rugi komprehensif.

### **C. Penurunan Hipotesis**

#### **1. Hubungan ukuran dewan komisaris dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.**

Penelitian yang dilakukan Arief dan Bambang (2007) menyatakan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan yang ukurannya kecil.

Namun, menurut Abeysekera (2008) ukuran dewan komisaris yang efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja *CEO* akan semakin tinggi, sehingga kinerja di perusahaan tersebut akan semakin baik. Dengan adanya peningkatan kinerja, maka transparansi dalam pelaporan keuangan akan baik

(Pitasari dan Septiani, 2014). Inti dari *corporate governance* ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H<sub>1a</sub> : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

H<sub>1b</sub> : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.

## **2. Hubungan proporsi komisaris independen dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.**

Dewan komisaris sebagai puncak sistem internal perusahaan memiliki peran penting terhadap aktivitas pengawasan. Semakin besarnya proporsi komisaris independen yang ada didalam perusahaan, maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini akan semakin berkualitas dengan semakin banyaknya pihak independen yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan. Komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang transparan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007) juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian Prawinandi *et al.* (2012), menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Arief dan Bambang (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang

terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Hasil penelitian Klein (2002), Peasnell *et al.* (2001), Chtourou *et al.* (2001), Pratana dan Mas'ud (2003), dan Xie *et al.* (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Cornett *et al.* 2006).

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H<sub>2a</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

H<sub>2b</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.

### **3. Hubungan ukuran komite audit dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.**

Keberadaan komite audit dalam perusahaan harus diperhitungkan. Komite audit tidak hanya membantu dalam pengawasan tetapi juga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Ketika komite audit membantu dalam penyusunan laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga pengungkapan dalam *annual report* akan diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan. (Ho dan Wong, 2001).

Komite audit dengan ukuran yang besar dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaporan keuangan. Jumlah komite audit yang bertugas menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Penelitian Kent dan Stewart (2008) di Australia menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan *IFRS*, dimana di dalamnya termasuk *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H<sub>3a</sub> : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

H<sub>3b</sub> : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.

#### **4. Hubungan jumlah rapat audit dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.**

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun. Semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit

memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Teori agensi mensyaratkan pengungkapan yang lengkap dan jelas dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, agar dapat memberikan transparansi dalam laporan keuangan maka perlu didukung oleh adanya agenda program kerja tahunan dari komite audit serta keteraturan rapat yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Hasil penelitian Supriyono *et al.* (2014), menunjukkan bahwa jumlah rapat komite berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan karena semakin tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja didalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H<sub>4a</sub> : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

H<sub>4b</sub> : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.

## **5. Perbedaan tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs di negara indonesia dan Malaysia**

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal Indonesian dan bursa Malaysia menjadi paling positif dibandingkan dengan negara lain di Asean. (Sukirno, 2015)

Pasar modal Indonesia memiliki potensi peningkatan dan prospek yang cukup baik. Jumlah perusahaan yang tercatat di BEI pada akhir 2012 berjumlah 459,

meningkat sebesar 16,5% dari posisi ditahun 2007. Kapitalisasi pasarnya mencapai 45,18% dari PDB pada tahun 2012, sedangkan rata-rata dunia sebesar 73,92%. Dalam pasar modal Malaysia mengalami penurunan jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia, pada tahun 2007 tercatat 1.036 perusahaan sedangkan pada tahun 2012 menjadi 921 perusahaan. Kapitalisasi pasar mencapai 156,94% dari PDB tahun 2012.

Di Indonesia, bursa efek mulai mengadakan *Capital Market Awards* dan *IICD Corporate Governance Award*, dan *IICG Award-Most Trusted Award* sebagai penilaian yang dilakukan berdasarkan pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan. Instrumen penilaian adalah *Corporate Governance Scorecard* yang juga digunakan oleh *Institute of Directors* lainnya di beberapa negara ASEAN. Sedangkan di Malaysia, terdapat *Malaysia Sustainability Reporting Awards (MASRA)* memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki prospek baik dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan, menyajikan laporan keuangan secara lengkap, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta meningkatkan kesadaran tentang isu-isu transparansi didalam perusahaan.

*Financial Reporting Foundation (FRF)* dan *Malaysian Accounting Standards Board (MASB)* pada tahun 2008 telah mengumumkan pernyataan rencana Malaysia untuk konvergensi penuh dengan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* pada 1 Januari 2012. *Malaysian Accounting Standards Board (MASB)* telah memasukkan ketentuan standar internasional ke dalam standar lokal akuntansi di Malaysia, dan *MASB* yakin bahwa dengan sepenuhnya mengadopsi *IFRS*, modal Malaysia dan keuangan pasar akan lebih meningkat. Kepatuhan dengan *IFRS*, yang digunakan oleh lebih dari seratus negara di seluruh dunia, akan memfasilitasi komparatif dan meningkatkan transparansi, kemudahan komunikasi, melintasi

perbatasan *listing*, mendorong arus modal. Untuk memfasilitasi perubahan bertahap ke *IFRS*, tanggal efektif untuk menerapkan *FRS 139 Financial Instruments: Pengakuan dan pengukuran* (setara Malaysia dari *IAS 39*) akan menjadi 1 Januari 2010. Pada 2012, semua standar akuntansi yang berlaku disetujui perusahaan publik, anak perusahaan, dan entitas publik lain akan menerapkan *IFRS* sepenuhnya. Dengan menerapkan *FRS 139* tahun 2010, dan lebih lanjut 2 tahun untuk mengadopsi standar yang tersisa, 2012 dipertimbangkan sebagai tanggal yang tepat untuk konvergensi. *MASB* berharap bahwa dengan pemberitahuan lebih dahulu, perusahaan akan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dalam melakukan perubahan.

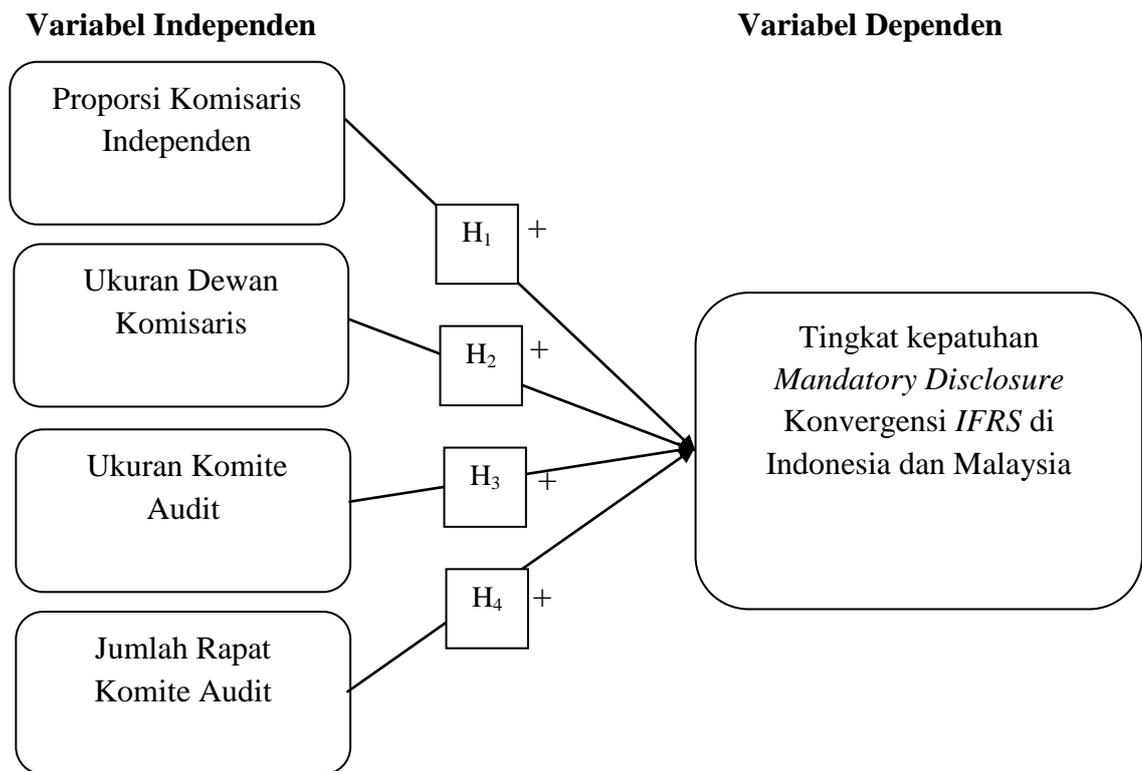
Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2008 dilakukan adopsi seluruh *IFRS* ke *PSAK*, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap *PSAK* yang berlaku. Kemudian pada tahun 2011, dilakukan penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan penerapan secara bertahap beberapa *PSAK* berbasis *IFRS*. Tahun 2012, penerapan *PSAK* berbasis *IFRS* secara bertahap, dan mengevaluasi dampak penerapan *PSAK* secara komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kelima penelitian ini adalah:

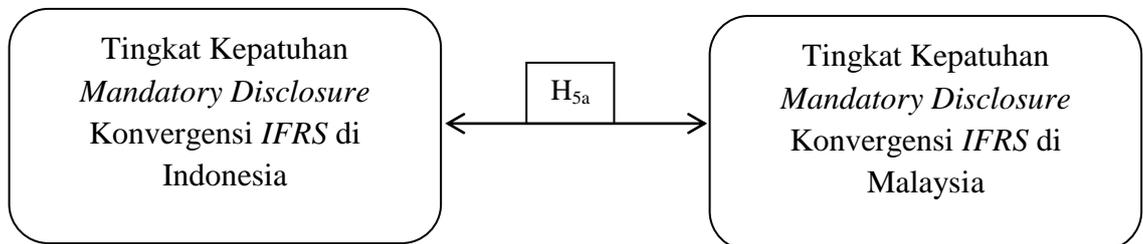
H<sub>5a</sub> : Terdapat perbedaan secara signifikan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.

H<sub>5b</sub> : Terdapat perbedaan signifikan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.

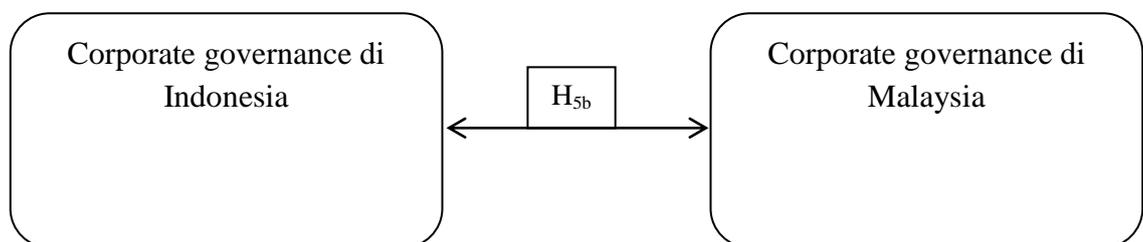
#### D. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian**



**Gambar 2.3**  
**Model Penelitian**